



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RAPAT KERJA KOMISI VI DPRRI DENGAN MENTERI  
PERINDUSTRIAN RI**

- Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : V (lima)  
Rapat Ke- :  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 2 Juni 2021  
Waktu : 13.39 s.d. 15.36 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara I Lt.1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P., Wakil Ketua Komisi VI DPRRI
- Acara : Pembahasan RKP KL dan RKA KL Tahun 2022  
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
- Hadir : A. Anggota DPRRI:  
48 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
11 dari 12 orang Anggota
    1. Aria Bima
    2. Adisatrya Surya Sulisto
    3. Muhammad Prakosa
    4. Darmadi Duriyanto (Matriks)
    5. Rieke Diah Pitaloka
    6. S.T Ananta Wahana, S.H
    7. Sonny T. Danaparamita
    8. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
    9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
    10. Sondang Tiar Debora Tampubolon
    11. dr. H. Mufti A.N. Anam
  2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
8 dari 8 orang Anggota
    1. I Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P
    2. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
    3. Drs. Mukhtarudin
    4. Lamhot Sinaga
    5. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
    6. Doni Akbar, S.E.
    7. Trifena M. Tinal, B.Sc.

8. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)  
5 dari 7 orang Anggota
  1. Mohamad Hekal, M.B.A.
  2. Khilmi
  3. Ir. H. La Tinro La Tunrung
  4. M. Husein Fadlulloh, S.Bus., M.M.  
M.B.A.
  5. Hendrik Lewerissa, S.H., L.L.M
  
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)  
5 dari 5 orang Anggota
  1. Martin Manurung, S.E., M.A.
  2. Nyat Kadir
  3. H. Subardi, S.H., M.H.
  4. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
  5. Muhammad Rapsel Ali
  
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN  
BANGSA (F-PKB)  
5 dari 6 orang Anggota
  1. Ir. H. M. Nasim Khan
  2. Tommy Kurniawan
  3. Marwan Ja'far
  4. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos.,  
M.Si.
  5. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.
  
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)  
5 dari 5 orang Anggota
  1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
  2. Muhammad Dhevy Bijak
  3. Hj. Melani Leimena Suharli
  4. Putu Supadma Rudana
  5. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.
  
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA (F-PKS)  
4 dari 4 orang Anggota
  1. Amin AK, M.M.
  2. Hj. Nevi Zuairina
  3. Rafli
  4. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.
  
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
(F-PAN)  
4 dari 5 orang Anggota

1. Nasril Bahar, S.E.
2. Primus Yustisio, S.E.
3. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.
4. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN (F-PPP)  
1 dari 2 orang Anggota  
1. Elly Rachmat Yasin

B. UNDANGAN

Menteri Perindustrian RI dengan jajarannya

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT / F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):**

Bener-bener jam 3, karena ada ada rapat khusus terbatas. Jadi, kita harap jam 3 bisa selesai. Hal-hal yang mengenai pendalaman dan sebagainya tentu kita akan perdalam lebih jauh ke, di nanti di RDP dengan para dirjen.

Saya mulai Pak Menteri boleh tidak Pak Menteri ya.

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,***  
**Salam sejahtera untuk kita semua,**  
**Syalom,**  
**Om Swastiastu,**  
**Namo buddhaya,**  
**Salam kebajikan,**

**Yang terhormat Anggota Komisi VI DPRRI,**  
**Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia beserta jajarannya,**

Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Perindustrian RI pada hari ini dalam keadaan sehat *wal afiat* dan terhindar dari wabah Covid-19.

Sehubungan dengan kondisi yang tidak kondusif saat ini terkait dengan penyebaran virus Covid-19 bahwa rapat-rapat dilakukan oleh alat kelengkapan dewan (AKD) dan mitra kerja pemerintah dilakukan dengan ketentuan antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 226 Ayat 3 Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berbunyi, "semua jenis rapat DPRRI dilakukan di gedung DPR kecuali ditentukan lain rapat dapat

dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR, maka pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara tatap muka dan atau secara virtual”.

2. Peliputan pelaksanaan rapat Komisi VI DPR dilakukan *live streaming* oleh TV Parlemen, media cetak dan media elektronik lainnya mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen.
3. Berdasarkan Pasal 249 Ayat 1 Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi, setiap anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat. Dikarenakan kondisi tidak kondusif, maka daftar hadir anggota dapat dilakukan secara elektronik. Kehadiran anggota tercatat dalam *list* partisipasi dalam aplikasi Zoom.
4. Rapat dihadiri paling banyak 20% dari jumlah Anggota Komisi serta mitra kerja dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Pendamping mitra kerja berjumlah maksimum 5 orang dan ditempatkan di balkon Ruang Rapat Komisi;
  - b. Pendamping dari mitra kerja yang tidak berhubungan langsung dengan rapat dan tidak tertampung di balkon untuk meninggalkan gedung DPRRI;
  - c. Pendamping dari mitra kerja yang tidak tertampung di ruang rapat maupun balkon dapat mengikuti secara virtual;
  - d. Pendamping dari anggota, tenaga ahli, staff administrasi anggota untuk tidak mendampingi anggotanya ke Komisi.

Selanjutnya, selanjutnya, berdasarkan surat dari Ketua DPR RI Nomor PW, PW nih Bu Evita, Pw ini Bu. PW/10736DPRRI/IX 2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pembatasan Kehadiran Fisik pada Rapat-rapat, kami meminta kesepakatan mengenai tatacara rapat yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan rapat-rapat di komisi dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 2) Lamanya pelaksanaan rapat disepakati pada saat pembukaan rapat agar lebih efisien dan efektif, maksimum 2 setengah jam;
- 3) Alur rapat sebagai berikut: pembukaan, kemudian presentasi singkat oleh kementerian dan lembaga, tiga pertanyaan anggota, kemudian tanggapan kementerian dan lembaga instansi, tanggapan balik Anggota, tanggapan akhir kementerian dan lembaga, kesimpulan dan penutup.

Presentasi awal diberikan 5 menit, tanggapan pertama 10 menit dan tanggapan akhir 10 menit. Anggota diberikan waktu menyampaikan pertanyaan selama 3 menit dan tanggapan balik selama 3 menit.

Lalu lintas rapat diatur oleh admin yang membantu pimpinan rapat terutama dalam menghidupkan dan mematikan *microphone* masing-masing peserta.

**Bapak ibu hadirin yang kami muliakan.**

Menurut laporan dari sekretariat Komisi VI DPRRI, Rapat Kerja hari ini dihadiri tanda tangani oleh 34 orang dari 54 Anggota Komisi VI DPRRI yang terdiri atas 9 Fraksi. Dengan demikian Kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 Ayat 1 Peraturan DPRRI Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Maka, perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Setuju.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.39 WIB)**

Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Perindustrian atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini dalam rangka pembahasan RKP KL dan RKA KL Tahun 2022 Kementerian Perindustrian. Berkenaan dengan suasana masih Idul Fitri 1442 Hijriyah, maka pada kesempatan yang baik ini kami juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin.

**Bapak, Ibu dan hadirin yang dimuliakan,**

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib antara lain adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang meliputi rencana kerja pemerintah, RKP, serta rencana kerja dan anggaran lementerian dan lembaga RKA KL dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPRRI.

Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi VI DPRRI pada hari ini adalah sesuai dengan surat dari Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/03981/DPRRI/III 2021 tanggal 23 Maret 2021 mengenai Penyampaian Rancangan Jadwal dan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan RKP Tahun 2022 yang menjadwalkan Rapat Kerja Komisi dengan mitra kerja antara tanggal 2 sampai dengan 10 Juni 2021. Untuk itu kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 3 ya.

**(RAPAT:SETUJU)**

Selanjutnya, kami persilahkan kepada Menteri Perindustrian untuk menyampaikan penjelasan lebih lanjut sesuai agenda rapat hari ini mengenai RKA dan KP Tahun 2022 Kementerian Perindustrian. Kami persilahkan, Pak Menteri.

**MENTERI PERINDUSTRIAN:**

Terima kasih.

Pimpinan Komisi VI yang saya hormati.

***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,***  
**Salam sejahtera untuk kita semua,**  
**Selamat siang,**  
**Om Swastiastu,**  
**Namo buddhaya,**  
**Salam kebajikan,**

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI DPRRI, Pak Dammer sebagai Pimpinan Rapat dan juga Pimpinan Komisi VI yang hadir melalui virtual, Juga, segenap Anggota Komisi VI yang saya hormati, baik yang hadir secara fisik di ruangan Komisi VI ini, maupun juga yang hadir secara virtual mengikuti rapat kerja kita, Yang hormati juga seluruh pejabat Kementerian Perindustrian yang mendampingi saya secara fisik, Seluruh pejabat Eselon I, Eselon II, dan juga ada beberapa pejabat yang mengikuti rapat siang ini secara virtual,**

Pertama-tama, masih dalam suasana yang penuh fitrah ini. Izinkan saya untuk menyampaikan selamat hari raya lebaran, Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dan juga bagi teman-teman yang Kristiani juga selamat hari kenaikan Isa Almasih.

**Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,**

Kami dari Kementerian Perindustrian juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dari Komisi VI untuk menjelaskan dan menyampaikan tentang pembahasan RKP KL dan RKA KL Tahun 2022 untuk Kementerian Perindustrian. Kami juga telah menyiapkan bahan-bahan berkaitan dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi VI kepada kami, namun sebelum kami memulai menjelaskan yang berkaitan dengan tema yaitu RKP dan RKA KL 2022, izinkan juga kami untuk secara ringkas menjelaskan gambaran umum kondisi dari sektor manufaktur saat ini. Kinerja marko dari sektor industri manufaktur.

**Pimpinan dan juga Anggota Komisi VI yang saya hormati.**

Perlu juga dilaporkan, saya yakin ini juga seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VI sudah memahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan industri pengolahan nonmigas triwulan 1 2021, di mana pertumbuhan ekonominya pada posisi minus 0,74, sementara pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada posisi minus 0,71 dan ini merupakan penurunan ketika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2020 yang lalu. Namun, sudah ada kenaikan apabila dibandingkan dengan kuartal keempat pada tahun 2020.

Perlu dilaporkan juga bahwa 5 besar pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan pertama 2021 yaitu, dicatat oleh industri

kimia farmasi dan obat tradisional, dimana kenaikan sebesar 11,46 dan juga industri furnitur 8,04, industri logam dasar 7,71, industri karet, barang dari karet dan plastik 3,84, industri mesin dan perlengkapannya 3,22. Sementara sektor industri yang masih terpuruk negatif harkit yaitu, sektor tekstil dan pakaian jadi -13,29, kemudian juga industri alat angkutan -10,93%, industri tembakau -9,58%, industri kayu dan barang dari kayu -8,51%, industri barang galian bukan logam sebesar minus koma 7, -7.28%. Sementara, nilai ekspor dan impor sektor industri dari mulai Januari sampai April 2021, kita bisa lihat ada peningkatan ya kalau kita bandingkan *year-on-year* pada tahun 2020, akhir 2020.

Ini justru ekspor nya mengalami kenaikan 131,13 miliar dolar dibandingkan dengan 2019 dan 2018, sementara untuk Januari-April 2020 ekspornya 42,77 miliar, sementara impornya 41,97 dan tahun ini Januari sampai April 2021, kita lihat ada kenaikan menjadi 53,87 miliar dolar dan importnya juga naik, ini menunjukkan bahwa ada permintaan dari bahan baku dan bahan penolong sebesar 48,33 miliar, sehingga ada surplus 5,54 miliar. Kontribusi ekspor sektor industri itu sebesar hampir 80%, tepatnya 79,94% terhadap total ekspor nasional. Jadi, hampir 80% ekspor sektor industri ini memberi kontribusi terhadap total ekspor nasional yang sebesar 67,38 miliar.

**Selamat siang, Pak Haikal.**

Selanjutnya kami juga melaporkan ini *fresh from the oven* yaitu, PMI *Purchasing Managers Index* kita yang baru saja dirilis hari ini, pagi tadi. Pada bulan Mei itu tercatat pada titik 55,3. Sekali lagi Indonesia secara dua bulan berturut-turut menciptakan atau mencatat rekor terhadap *purchasing managers index* kita dimana pada bulan Mei tahun 2021, PMI Cina itu sebesar 52, PMI dari India 50,2, PMI dari Jepang 53,2, PMI-nya Malaysia 51,3, Singapore 51,8, Thailand 47,8 dan Amerika 62,1. Jadi, Indonesia masih mencatat PMI tertinggi di negara-negara ASEAN, termasuk di atas Cina dan India, hanya kalah dari Amerika Serikat. Saya kira ini laporan.

Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tema dari rapat kita pada siang hari ini, yaitu pagu indikatif Kementerian Perindustrian Tahun 2022.

**Pimpinan Komisi VI,  
Anggota Komisi VI yang saya hormati,**

Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-361/MK.02/2020 tanggal 29 April 2021 telah menyatakan bahwa pagu indikatif dari Kementerian Perindustrian sebesar Rp 2.610.978.618.000. Adapun rinciannya secara umum yaitu, belanja pegawai sebesar Rp 797.591.613.000, di sini ada gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga dan juga uang makan.

Rincian kedua adalah belanja operasional sebesar Rp 360.576.586.000, di sini ada biaya operasional perkantoran, biaya pemeliharaan peralatan kantor dan gedung, kemudian rincian yang ketiga belanja nonoperasional, ini

sebesar Rp 1.452.810.419.000 yang merupakan kegiatan prioritas nasional dan kegiatan regular. Adapun kegiatan prioritas nasional ini 70% sebesar Rp 1.022.612.447.000, sedangkan kegiatan nonprioritas regular sebesar Rp 430.197.972.000 atau 30%. Anggaran pendidikan ini dalam pagu indikatif sebesar 969 miliar. Adapun sumber pendanaan dari pagu indikatif Kementerian Perindustrian itu berasal dari rupiah murni 2.244 miliar, PNBPN 148 miliar, BLU 99,668 miliar, SBSN 118,43 miliar.

**Pimpinan Komisi VI,  
Anggota Komisi VI yang terhormat,**

Kita bisa lihat sandingan anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2021 dan 2022 di mana yang oranye ini menunjukkan pagu indikatif, dan yang biru menunjukkan DIPA 2021. Untuk pagu total kita lihat ada penurunan, sekarang dua, pagu indikatifnya 2,6 triliun, sedangkan pagu, sedangkan DIPA 2021 3,181 triliun. Belanja nonoperasional, ini juga kita lihat ada penurunan dari 584 miliar menjadi 430 miliar, belanja nonoperasional juga ada penurunan dari 1,40, 1,466 triliun, 1 triliun 4,66 miliar menjadi 1 triliun 22 miliar. Belanja operasional juga turun, mohon maaf, belanja operasional ini satu-satunya yang naik. Di mana pada DIPA 2021 sebesar 352 miliar dan sekarang naik menjadi 360 miliar. Belanja pegawai juga naik dari 778 miliar menjadi 797 miliar.

Selanjutnya, sandingan anggaran pendidikan PNBPN, BLU, SBSN Kementerian Perindustrian Tahun 2021-2022. SBSN ini pertama kali, jadi akan ada dalam sudah ada dalam pagu indikatif sebesar 118 miliar 434 juta. BLU ini targetnya dinaikkan dari 95 miliar menjadi 99 miliar. PNBPN pun naiknya targetnya dinaikkan jadi menjadi 148 miliar 509 juta dari 141 miliar 744 juta. Jadi, pagu indikatifnya diturunkan, tapi harapan dari BLU dan PNBPNnya dinaikkan. Anggaran pendidikan juga bisa kita lihat turun dari DIPA 2021 sebesar 1 triliun 418 miliar, di mana dalam pagu indikatif 2022, 969 Miliar.

Rincian pagu per unit Eselon I, pagu indikatif tahun 2022. Ini ditempat sekretariat jendral, ini jumlahnya 220 miliar 769 juta, di Direktorat Industri Agro jumlahnya 100 miliar 901 juta, di IKFT Dirjen IKFT sebesar 104 miliar 239 juta, di Direktorat Jendral LMAT sebesar 116 miliar 63 Juta, di Direktorat Jendral IKMA sebesar 291 miliar 413 juta, di tempat Irjen 40 miliar, di BSKJI (Badan Standarisasi Kebijakan Jasa Industri) sebesar 663 miliar 296 juta, di Direktorat Jendral KPAll sebesar 91 miliar 650 juta, dan di BPSDMI sebesar 982 miliar. Keterangannya adalah badan BSKJI PNBPN-nya ditargetkan 98 miliar 196 juta, BLU 84 miliar 120 juta dan SBSN 43 miliar 219 juta, sedangkan di BPSDMI PNBPN-nya ditargetkan 50 miliar 177 juta, BLU 15 miliar 548 juta dan SBSN 75 miliar 215 juta.

Kami juga ingin melaporkan kegiatan prioritas dari Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran depan, tahun anggaran 2022 untuk Direktorat Jenderal Industri Agro ini ada 12 kegiatan seperti yang kami sudah sampaikan dalam dokumen, kami hanya menyampaikan beberapa contoh. Di agro misalnya, ada kegiatan verifikasi pemanfaatan bahan baku gula impor



untuk industri, kemudian juga fasilitasi pengembangan pusat logistik industri furniture dalam rangka implementasi konsep rantai alur, bahan baku industri pengolahan kayu dan rotan, ada juga fasilitasi pengembangan *pilot plant*, *pilot plant industry IVO/ILO* (*Industrial Vegetable Oil* dan *industrial Lauric Oil*) yang dibangun sebagai bahan baku industri *Green fuel* atau bisa B100, juga ada program fasilitasi pengembangan hilirisasi industri pengolahan sagu dan pati, ini juga dalam rangka substitusi impor, ada program restu atau restrukturisasi mesin, peralatan industri furnitur dan lain-lain sebagainya.

Sementara di IKFT, ini ada 15 kegiatan prioritas. Salah satu contohnya adalah kegiatan restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil, kulit dan alas kaki. Ada kegiatan penguatan rantai pasokan industri dalam negeri menuju substitusi impor produk IKFT, juga ada koordinasi pemberian insentif industri kimia hilir dan farmasi, tentu juga kami tetap mendorong pelaksanaan industri 4.0 di sektor industri, industri kimia dan farmasi, juga sektor industri semen keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam, juga sektor tekstil dan *apparel*, juga ada kegiatan pembangunan pusat pengolahan bahan baku mineral nonlogam.

Sedangkan untuk ILMATE, Direktorat Jendral ILMATE ada 23, 23 kegiatan prioritas nasional pada tahun 2022, sebagai contohnya adalah peningkatan utilisasi produksi dan investasi sektor industri logam, mesin alat transportasi dan elektronika, ada kegiatan industri komponen yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur, ada industri logam yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas, industri besi baja yang tersertifikasi kemampuannya dalam rangka pemenuhan data *supply demand* industri baja nasional, ada penguatan industri ventilator-ventilator dalam negeri, kemudian juga pengembangan *Center of Excellence* industri alat kesehatan.

Selanjutnya untuk Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, IKMA. Ini ada 10 kegiatan prioritas. Saya kira ini 10-10-nya harus saya baca, karena penting sekali untuk IKMA ini.

Yang pertama fasilitasi peningkatan kemampuan sentra IKM, fasilitasi penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri, restru mesin peralatan untuk IKM, fasilitasi IKM dalam mengikuti pameran dalam dan luar negeri, fasilitasi penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin, peralatan untuk IKM, kemudian juga layanan HKI, desain dan kemasan, wirausaha baru, terus pondok pesantren, pemanfaatan TPL IKM, PFPP, dan penerapan *making industry 4.0* untuk IKM, pembinaan IKM di sentra-senta IKM yang direvitalisasi dan akan dibangun, juga promosi dan pendampingan pembiayaan berkaitan dengan KUR, pengembangan sektor industri aneka, fasilitasi *e-smart* untuk IKM, pengembangan industri kecil menengah persepatuan, dan juga penumbuhan, pengembangan dan penyebaran IKM di 34 provinsi melalui program dekon.

Untuk KPAIL ada 17 program, antara lain: fasilitasi pendampingan peningkatan daya tahan industri, *industry intelligent*, *industry intelligent* dan peluang industri dalam negeri, pengembangan investasi kawasan industri

halal, Kawasan industri prioritas di luar pulau jawa yang beroperasi dan juga untuk meningkatkan investasi.

Untuk BSKJI, Badan Standarisasi Kebijakan Jasa Industri. Ini ada, ada 11 kegiatan prioritas, seperti pembangunan fasilitas produksi fitofarmaka, pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, percepatan pemanfaatan transformasi industri 4.0 dalam rangka penguatan ekosistem industri 4.0, kemudian juga rancangan standar industri hijau, fasilitasi sertifikasi industri hijau, rancangan SNI, ST dan PTC, peralatan fasilitas laboratorium pengujian untuk menunjang SNI wajib.

Sedangkan, untuk BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri ada 11 kegiatan prioritas juga. Di mana contohnya adalah rencana SKKNI sektor industri, kemudian juga tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem 3 in 1, kemudian pengadaan peralatan dan operasional operasionalisasi PIDI 4.0, SMK yang *link and match* dengan industri, kemudian juga pembangunan Gedung Pendidikan SMAK Bogor dengan sumber daya SBSN.

Sedangkan program dukungan manajemen di tempat sekretariat jenderal dan inspektorat jenderal, ini ada 6 kegiatan prioritas yaitu, evaluasi regulasi bidang industri, pengembangan SDM Kemenperin yang kompeten dalam industri 4.0, koordinasi pelaksanaan rencana aksi program *making Indonesia 4.0*, pengembangan *platform* data dan informasi industri 4.0, sertifikasi TKDN, kemudian juga *assurance* pelaksanaan program prioritas.

**Pimpinan Komisi VI,  
Segenap Komisi VI yang saya hormati,**

Ini ada satu kepentingan bagi kami untuk apa menyampaikan beberapa usulan. Sementara, usulan ini akan kami bagi menjadi dua katagori. Yang pertama adalah usulan inisiatif program super prioritas dan juga yang kedua, usulan inisiatif program pendukung.

Untuk usulan inisiatif program super prioritas 2022, kami mengusulkan ada 11 bentuk kegiatan. Yang pertama, yaitu pembangunan Indonesia *manufacturing center*. Ini nanti akan, PICnya akan ILMATE. Disini kebutuhan anggarannya adalah 433 miliar, *benefit* dari kegiatan kami percaya yaitu, ini dalam rangka untuk memfasilitasi hasil litbang produk *engineering* menjadi produk.

Ya, jadi hasil litbang *engineering* menjadi produk baru. Kemudian juga sistem informasi hasil litbang dari perguruan tinggi-perguruan tinggi, praktisi dan pemerintah serta *database* teknologi, SDM, bahan baku dan *supply and demand*, kemudian juga bisa menjadi solusi bisnis teknologi, bisnis teknologi melalui inovasi atas proses, produk dan bisnis model dalam peningkatan daya saing untuk substitusi impor, serta dalam rangka penguatan rantai *supply*. Ini rencananya apabila anggaran bisa di setujui oleh DPRRI bersama dengan Menteri Keuangan. Kami sudah punya lahan Pak Pimpinan, dan Anggota

Komisi VI di Purwakarta. Lahannya dari yang sudah dimiliki oleh Kementerian Perindustrian. Jadi, masalah lahan *insya* Allah tidak ada masalah.

Kemudian yang kedua, program super prioritas yaitu, pembangunan PIDI, peralatan *up skilling* dan *reskilling* sebesar 341 miliar, yang PIC-nya akan ada di BPSDMI. *Benefit* dari kegiatan ini adalah untuk mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi bagi pengembangan SDM dalam era industri 4.0, juga penyiapan SDM industri 4.0 yang tersertifikasi.

Usulan kami yang ketiga yaitu, *material center* dan restrukturisasi IKM, nanti PIC-nya IKMA dan IKFT. Ini kebutuhan anggarannya kami hitung sebesar 92 miliar. *Benefit* dari kegiatan ini adalah untuk membantu industri kecil yang mengalami kesulitan bahan baku dan bahan penolong, serta penyerapan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai bahan baku industri dan penguatan basis data IKM dalam mendukung pengambilan kebijakan di sektor IKM, termasuk penguatan data dan neraca komoditas.

Ini ada diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk turunannya yaitu, PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sektor Industri, PP 28 Tahun 2021. Jadi, kalau sudah diamanatkan oleh undang-undang tapi, kami di Kementerian Perindustrian belum bisa mendapatkan anggarannya, saya kira itu bisa apa memperlambat maksud dan tujuan kita untuk mempercepat dari pertumbuhan itu sendiri.

Selanjutnya yang kami usulkan yaitu, program super prioritas dan program super prioritas yaitu, penumbuhan dan pengembangan apa usaha baru, yang ini nanti akan di PIC-nya ada di IKMA sebesar 150 miliar. Ini tentu terciptanya wirausaha baru berbasis potensi daerah potensial. Nah ini, kami berharap apabila nanti anggaran ini disetujui, ini bisa bersama-sama dengan seluruh Anggota Komisi VI dengan bisa berpartisipasi aktif dalam seleksi dan mewujudkan, membina wirausaha baru di, mungkin di dapilnya masing-masing.

Selanjutnya, nomor 5 neraca komoditas (*material center*, verifikasi data dan infrastruktur daerah). Nanti, PIC-nya ada di Pak Sekjen melalui Pusdatin dan juga IKMA. Ini juga sama, perintah dari Undang-Undang cipta kerja dan PP 28 tahun 2021. Ini adalah pembangunan infrastrukturnya, karena nanti semua neraca komoditas itu kami akan menyusun, sehingga memang sangat sangat diperlukan infrastruktur yang memadai. *Benefit* dari kegiatan ini adalah menyediakan data yang lengkap dan *valid*, sebagai dasar perumusan kebijakan penyediaan bahan baku, bahan penolong industri dalam negeri dan juga data *supply and demand*, pengendalian impor, dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri.

Kemudian yang keenam, pengadaan infrastruktur pendukung program pengendalian IMEI, *International Mobile Equipment Identity*. Ini juga nanti akan ditempatkan di pusdatin bersama-sama dengan ILMATE. Kami mengusulkan sebesar 96 miliar. Ini juga infrastruktur di mana infrastruktur ini adalah dipergunakan untuk proses registrasi produk-produk HP baru dan tentu ini sangat kita perlukan untuk mengantisipasi adanya kenaikan

kapasitas dari produsen-produsen, khususnya produsen dalam negeri dan juga ini *benefit* dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi ledakan ponsel ilegal, juga meningkatkan pertumbuhan industri elektronika dalam negeri melalui perbaikan ekosistem investasi dan pengawasan barang ilegal.

Yang ketujuh, penyediaan lahan kawasan industri sebesar 50 hektar, serta fasilitasi dan pendampingan proyek KPBU Kawasan Industri Teluk Bintuni. Nanti PIC-nya ada di KPAI dan juga IKFT.

Kemudian juga yang kedelapan, kampanye dan fasilitasi sertifikasi halal produk industri, nanti akan ada di sekjen melalui PPIH, PPIH adalah pusat pemberdayaan industri halal Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI. Ini merupakan lembaga baru yang kami bentuk, ya ini setingkat Eselon II. Ini kami membutuhkan, kami dah hitung sebesar 25 miliar kebutuhannya. Tentu *benefit* kegiatannya adalah untuk jaminan produk berkualitas bagi masyarakat dan juga mampu bersaing dalam pasar halal, baik domestik maupun global.

Yang kesembilan, implementasi industri 4.0 dan penanganan limbah produksi pada industri penyempurnaan dan percetakan kain melalui restrukturisasi mesin dan peralatan. Ini adalah asistensi pada sektor PPT agar proses produksi bisa lebih, bisa lebih ramah lingkungan melalui implementasi 4.0. Adapun *benefit* kegiatannya adalah untuk mengakomodasi standar *sustainability* dan insentif untuk investasi teknologi untuk industri tekstil dan produk tekstil, khususnya pada industri penyempurnaan dan percetakan kain, meningkatkan daya saing produktivitas efisiensi energi dan pendalaman struktur industri tekstil dan produk tekstil dan juga meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.

Yang kesepuluh, ini pengembangan industri produk karet di kawasan Sei Mangke. Ini untuk mendorong agar petani-petani karet kita bisa lebih sejahtera, kami sudah menghitung kebutuhan anggarannya sebesar 25 miliar, tentu *benefit* dari kegiatan ini adalah menciptakan ekosistem yang fasilitatif bagi peningkatan aktivitas *cross-border value chain*, dan juga mempercepat transformasi industri pengolahan *downstream* dan *midstream* agar berkembang menjadi *higer value rubber*. *Last but not least*.

### **Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat.**

Kami mengajukan usulan untuk, sebetulnya untuk menambah atase perindustrian kita yang ada di luar negeri. Kami sebetulnya juga sudah pernah mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk menambah dua atase baru. Sekarang, kami punya di di Taipei, Tokyo dan Brazil.

Nah, kami ingin menambahkan di dua lokasi baru yaitu, Beijing dan Seoul dan sebenarnya Pak Presiden sudah memberinkan *green light* ya, tapi dari Kementerian Keuangan sampai sekarang belum mendapatkan persetujuan terhadap itu. Nah ini, pembentukan atase industri di Seoul dan Beijing. Sebetulnya, kita juga bisa menjelaskan perbedaannya apa si antara atase industri dengan atase perdagangan industri, jelas *totally* berbeda. *Benefit* kegiatannya adalah meningkatkan kerja sama industri dengan Cina dan

Korea Selatan. Di mana kita sekarang sedang giat-giatnya melaksanakan, atau melakukan kerja sama industri antara kedua negara dan juga mendorong penguatan global *value chain* industri Indonesia, khususnya untuk investasi yang berasal dari Cina dan Korea Selatan.

**Pimpinan Komisi VI,  
Anggota Komisi VI yang terhormat,**

Selain dari usulan super prioritas yang barusan saya sampaikan, kami juga ingin melengkapi usulan kami, yaitu usulan inisiatif program pendukung, program pendukung. Ini juga sama-sama pentingnya di mana kami tidak akan membacakan satu-per satu untuk menigkat atau menghemat waktu, kami hanya akan menyampaikan bahwa usulan inisiatif program pendukung di tempat sekretariat jendral itu kebutuhannya sebesar 183 miliar.

Sedangkan, di inspektorat jendral kebutuhannya sebesar 10,8 miliar. Adapun untuk Direktorat Jendral IKMA, Industri Kimia Farmasi dan Tekstil, kami mengusulkan, kami mengusulkan untuk program pendukung sebesar 52 miliar 100 juta. Untuk Direktorat Jendral ILMATE, Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika. Kami mengusulkan program pendukung sebesar 58 miliar 700 juta dan untuk industri Direktorat IKMA, Industri Kecil Menengah dan Aneka.

Kami mengusulkan sebesar 84 miliar 800 juta. Untuk BSKJI, kami usulkan cukup besar usulan kami, sebesar 529 miliar 650 juta. Sedangkan untuk KPAIL, Direktorat Jendral KPAIL, kami mengusulkan program pendukung sebesar 37 miliar dan untuk BPSDMI kami mengusulkan program pendukung sebesar 661 miliar 800 juta. Sehingga, total usulan inisiatif program super prioritas plus program pendukung yang kami usulkan adalah sebesar 3.009.341.333.000.

Saya kira, Pimpinan, para Anggota Komisi VI yang terhormat. Itu yang bisa kami sampaikan dan kami laporkan pada forum yang terhormat ini. Selanjutnya, tentu kami dari Kementerian Perindustrian mohonkan dukungan yang sebesar-besarnya dari Komisi VI untuk juga memperjuangkan, barangkali dalam Banggar dan saya kira komitmen kita bersama, pemahaman kita bersama bahwa apabila kita mendukung pembangunan sektor industri manufaktur, yang kita lihat dari berbagai macam data selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi nasional, maka wajar saja apabila apa namanya yang kami usulkan bisa berkenan dari Komisi VI untuk membantunya.

Selanjutnya, kami mohon arahan. Terima kasih banyak.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Om Shanti Shanti Shanti Om.

**KETUA RAPAT:**

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pak Menteri sebenarnya kalau saya boleh bilang, posisi Menteri Perindustrian memang sangat strategis sekali. Karena, saya melihat dari penambahan-penambahan yang diharapkan oleh Pak Menteri, ini sebenarnya yang menjawab tantangan kita ke depan. Karena, kami di Bali itu Pak, pariwisata besar sekali pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi hampir 68% dan sekarang mereka ingin berbalik ke pertanian, saya bilang salah kalau ke pertanian. Kenapa, karena saya pernah waktu itu di Komisi IV dengan Pak Mukhtarrudin waktu itu ke Norwegia, Pak. Kalau kita memajukan pertanian dengan apa dengan teknologinya, maka justru mengurangi tenaga kerja, kemudian mempersempit kepemilikan.

Mengurangi tenaga kerja, mempersempit kepemilikan. Ini terjadi di negara-negara Skandinavia tentang pertanian ini. Maka justru yang mesti digalakkan itu ya industrinya, industri yang mendunia yang harus dipakai oleh seluruh dunia nanti, kayak *handphone* tadi Pak Menteri bicara. Ini sebenarnya, makanya saya bilang perindustrian sangat strategis ke depan ini untuk menyelesaikan persoalan di negara kita, persoalan ketenagakerjaan kita. Jadi, kalau beralih ke pertanian itu sebenarnya salah, karena kita berpengalaman pada negara-negara di Skandinavia itu.

**Pak Menteri yang saya hormati, dan  
Rekan-rekan Komisi VI,**

Kami silakan tolong ini singkat-singkat, karena Pak Menteri nanti ada rapat terbatas jam 4, jadi kalau bisa jam 3 jam 3 lebih dikit lah selesai. Sehingga, Pak Menteri bisa melakukan rapatnya. Toh nanti juga dalam pendapat pedalaman-pedalaman selanjutnya, kami kan ada RDP dengan para dirjen, sehingga detailnya nanti lebih banyak kita ke dirjen. Kalau yang ke makro mungkin sekarang dipertanyakan, sehingga waktunya cukup efisien dan efektif kita bisa lakukan hari ini.

Silakan, Habib Nasim Khan.

**F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):**

Terima kasih Pimpinan yang kami banggakan.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

**Bapak Menteri,  
Bapak Sekjen,  
Bapak Deputi dan seluruh jajaran Kementerian Perindustrian,**

Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya karena baru ketemu kita. Karena saya sudah disuruh singkat tadi, yang pertama saya pingin interaktif dulu satu. Pak Menteri, saya mau bertanya nih bersama temen-temen. Pak Menteri *kerasan* di Komisi VI kan? Siap ya, Pak Menteri ya.

**MENTERI PERINDUSTRIAN:**

*Kerasan* sekali.

**F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):**

Jadi, seandainya suatu saat ada guncangan-guncangan Pak Menteri akan diminta dihibahkan dan lain-lain oleh komisi lain gimana, Pak Menteri?

**MENTERI PERINDUSTRIAN:**

Saya duduk di sini sebagai menteri.

**F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):**

Iya.

**MENTERI PERINDUSTRIAN:**

Kepindahan dari kementerian mana pun itu ada keputusan politik. Jadi, di luar sana saya bisa jadi politisi juga, Pak.

**F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):**

Gitu ya Pak.

**MENTERI PERINDUSTRIAN:**

Jadi, tidak ada perbedaan antara menjadi menteri dan jadi politisi.

**F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):**

Tapi, secara hati nurani Pak Menteri lebih cinta kasih sayangnya di Komisi VI ya. *Insyah* Allah.

**MENTERI PERINDUSTRIAN:**

Komisi VI, Pak.

**F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):**

Kalau sudah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa ini penentu pemimpin bangsa menentukan, *insyah* Allah Pak. Bapak akan terjaga di sini ya. Terima kasih. Karena, bagaimanapun juga tupoksinya Kementerian Perindustrian tidak bisa dipisahkan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Dulu aja satu Pak Perindustrian Perdagangan, ya kan.

Kalau dipisahkan bagaimana. Bagaikan anak dan ibu dipisahkan, kan gak asik Pak ya. Karena, saya yakin fungsi tugas kita dalam pembahasan segalanya legislatif dan Undang-Undang dan apa namanya legislasi ataupun pengawasan kita, kita lebih sinergi, lebih bagus dalam segala halnya. *Insyah* Allah saya yakin Pak Menteri, Pimpinan perlu jadi kesimpulan dicatat itu Pak ya. Jadi, Komisi VI tetap Pak Menteri bersama kita. Terima kasih. Itu yang pertama, Pak Menteri.



Yang kedua Pak Menteri, saya berharap Pak Menteri di 2022. Saya berharap untuk Kementerian Perindustrian lebih inovatif, lebih kreatif iya kan, lebih produktif dalam segala hal penataan. Itu saya sampaikan kepada seluruh, ini mumpung di awalnya ini, semua Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, BUMN, kami berharap semuanya bukan hanya *copy-paste*, Pak. Karena, saya melihat sudah dua periode di sini semuanya pokoknya laporannya ini *copy-paste* semua, Pak.

Nah, saya berharap apa yang lebih produktif, aktif, inovatif, yang benar-benar program pemerintah Bapak Jokowi harapkan untuk Indonesia bangsa kita ini lebih bagus ke depan ya. Pak Menteri, kami tahu warna-warni di dalam Kementerian kita semua mitra kita, tapi ayolah kita sisihkan dulu warna-warni, politis ini. Kita 5 tahun bekerja untuk bangsa, untuk rakyat Pak Menteri. Masalah coblosan nanti di pemilu terakhir 1 hari cuma. Tapi, kita bekerja untuk rakyat.

Apalagi kami dari PKB, partai untuk rakyat, yang jelas-jelas kultur di bawah sangat membutuhkan dari seluruh program pemerintah ya, Pak. Khususnya Pak, perlu diketahui hampir 60% kita dari Nahdlatul Ulama dan juga beberapa komponen Muhammadiyah dan lain-lain. Kita Pak mempunyai 35.000 pondok pesantren di Indonesia, jangan lupa Pak. Kaum ulama, masai, santri, memperjuangkan Indonesia menjadi merdeka, mempertahankan kemerdekaan adalah kami para kaum ulama dan santri.

Itu jangan dilupakan dan otomatis *output*-nya dalam segala memajukan bangsa tidak usah khawatir, Pak. Santri akan lebih bertanggungjawab, buktikan Pak *safetyfitas* nya dalam program penanganannya, saya jamin. Buktikan kalau tidak percaya. Hampir 10 juta santri yang terdata pada hari ini, Pak belum termasuk alumni. 16 juta, Pak ya, 16 juta yang itu baru terdata Pak. Hampir satu juta para ustad, para guru yang terdaftar dalam kelembagaan ini semuanya, ini semua lembaga, ini Departemen Agama Pak ya.

**KETUA RAPAT:**

Kalau soal data Bapak tanya yang kiri itu, Pak.

**F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):**

Iya betul.

**KETUA RAPAT:**

Yang dikiri Bapak itu.

**F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):**

Itu jelas, Pak Menteri ya. Jadi, tolong dalam program Kementerian Perindustrian ini, kami terima kasih dalam tupoksi tadi ada masalah

berwirausaha untuk pondok pesantren, tapi kami pingin nanti beberapa hal lebih spesifikasi Pak, ya kan. Jaminannya nggak usah khawatir, karena terus terang sinergi antara kementerian juga perlu diperhatikan, Pak.

Yang ketiga kepada kedinasan di kabupaten kota. Bapak boleh cek data di situ dan saya kira deputi-deputi Bapak Ibu sudah paham. Selama ini kan selalu kalau di dinas itu ya itu-itu saja programnya, turunnya penerima ya itu-itu saja. Ini perlu evaluasi pak, perlu di *kroscek*. Kami DPR juga akan turun mengawal dan melakukan fungsi tugas pengawasan, yakan.

Karena, tupoksi eksekutif adalah di anda semua dan termasuk dinas, kami akan melakukan pengawasan bersama nanti dengan kementerian, apa yang lebih bermanfaat yang dirasakan oleh masyarakat di bawah, itu yang kami. Jadi, apa yang diharapkan Bapak Jokowi, pemerintahan Indonesia dan bangsa kita itu benar-benar bisa terjadi, apa proses dari TKDN juga itu penting Pak, ya kan tingkat kandungan dalam negeri itu perlu ditingkatkan, Pak. Bagaimana kita bisa produksi industri ini benar-benar milik kita pak, tidak hanya sebagai impor-impor saja, memang duitnya cepet Pak kalau impor Pak, tapi apa tidak salah kalau kita pada akhirnya lebih besar lagi mengeksport dengan produksi industri kita yang punya, ah itu yang ketiga.

Yang keempat Pak, kami perlu penjelasan Pak, kenapa di sini *point*-nya dibahas cuma 8 Pak. Padahal, Bapak memberikan kami ini untuk program eselon ini 9. Nah, BPSDMI kenapa nggak dimasukkan. Saya tidak perlu memperpanjang, apa karena takut perpanjangan nanti pembahasannya panjang, saya nggak tahu ini ya.

Di sini tidak ada nomor 9, nah di tempat saya nggak ada nih Pak, cuma sampai 8. Saya minta sekretariat cuma sampai 8, 9-nya belum BPSDMI. Pak, kami paham BPSDMI ini sangat bagus. Tapi tolong, saya sudah koordinasi dengan deputi yang kemarin untuk perluasan wawasan wacana dari BPSDMI ini lebih dikembangkan, Pak tolong Pak. Contohnya, pengembangan industrial di pondok pesantren. Karena terus terang, di sini dana paling terbesar itu adalah BPSDMI, Pak. Sedangkan dana ini saya *kroscek* mengambil dari sebelumnya di IKM yang sangat dirasakan oleh masyarakat, jujur Pak.

Nanti, saya ingin mendapat penjelasan Bapak, evaluasi kemarin dari Deputi keindustrian EKM, diambil BPSDMI *output*nya positif mana, hasilnya lebih bagus mana. Saya ingin tahu jawaban itu ya. Kalau kami terus terang dari PKB, berharap BPSDMI ini dikurangi, Pak. Dikurangi dievaluasi, bukan digoreng pagu indikatif ya. Dialihkan kepada IKM, yang lebih di masyarakat dimanfaatkan Pak dan ini terbukti Pak ya misalkan, BPSDMI ini 900 menjadi 700 dimasukkan kepada IKM ya kan.

Lalu setelah itu, BPSDMI diluaskan Pak pemaparannya, bukan hanya kepada kemarin itu apa SMA ya SMA SMK, pelaku industri ini bukan hanya SMA, Pak yakan. Para santri, para usahawan kecil UMK dan semua bukan hanya pada sekolah malah. Jadi, tupoksinya harus kena ini Pak, ya kan. Jadi, apapun ide dari kementerian kami dukung Pak, jangan kan itu, dana Bapak di

2022 ini Pak Menteri turun, kami dukung untuk naik lagi kalau perlu dua kali lipat, asalkan bener-bener dirasakan oleh bangsa ini bermanfaat kepada rakyat, itu yang kami harapkan.

**KETUA RAPAT:**

Sudah?

**F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):**

Saya kira itu Pimpinan. Kami harap menjadi nanti apa spesifikasinya di lebih detail di rapat RDP. Sebelum kita duduk bersama Pimpinan, kita ingin kumpul nanti bagaimana cara, kalau perlu diadakan konsinyering RKA KL dalam tiap deputi, sehingga bermanfaat sehingga nanti 2022 lebih baik, Pak Menteri kita. Karena, Pak Menteri kita luar biasa cintanya sama kita dan berjanji tidak akan meninggalkan Komisi VI, Pimpinan.

Terima kasih.

***Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq,  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

**KETUA RAPAT:**

Jadi, nanti pendalaman di RKA, di konsinyering ya pendalamannya. Jadi, lebih detail lagi nanti kita bahas apa-apa yang menjadi program dari Kementerian Perindustrian. Kalau masalah data tadi, Bapak lupa data, itu di sebelahnya itu jago tentang santri, tentang pesantren, Pak.

Silakan, Pak Darmadi. Prof. Darmadi.

**F-PDIP (DARMADI):**

**Terima kasih, Pimpinan.**

Kalau Nasim tadi 15 menit, saya minta 20 menit. Karena, PDI Perjuangan suaranya lebih banyak dari PKB, dia pura-pura nggak denger. PDI Perjuangan suara lebih banyak dari PKB.

**F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):**

Ya wajarlah, masalah politis Pak Darmadi.

**F-PDIP (DARMADI):**

Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri atas kehadirannya. Biasanya hadir di *online*, ya kali ini bisa *offline*. Kami sangat menghargai. Karena, kami sering protes. Bapak sering hadir *offline* ya, tapi hari ini Bapak hadir *online* beserta jajarannya. Ini menggembirakan buat kami.

Beberapa poin tadi sudah disampaikan Pak Nasim tadi, memang ini ada penurunan pagu indikatif yang cukup besar ya. Ini tentu ada efek, efek ke anggaran, efek ke program ya. Kami minta *wise policy* yang lebih bagus dari Pak Menteri lah. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang lebih berguna, masuk ke yang tidak berguna.

Tadi Pak Nasim sudah ngomong soal IKMA, IKMA itu banyak penurunan Pak Menteri. Dirasakan masyarakat luas, seperti yang dikatakan Pak Nasim itu banyak merasakan dampaknya. Sementara, BPSDMI itu kami nggak ngerti ada apa kerjanya sampai sekarang. Ini kan jelas-jelas, kadang-kadang kami rasakan itu tidak terlalu berguna, kemudian dialihkan ke IKMA yang sekarang hanya 2022 hanya 150 miliar untuk program IKMA-nya, untuk program pelatihannya. Nah, ini tolong diperhatikan Pak Menteri ya. BPSDMI, BPSDMI ini menyerap anggaran yang sangat besar sudah, terlalu besar sudah malahan. *Output*-nya apa ini ya, kami juga kurang jelas.

Yang kedua, kami apresiasi Bapak Menteri lebih *kerasan* di sini. Sudah *kerasan* di sini ya, dan saya dari hati ke hati bisa merasakan sebetulnya ya. Pak Nasim yang sedang ngomong bahwa memang VI ini lebih cocok ke industri perdagangan, nggak bisa dipisah. Ya, jangan dipisah-pisah. Hubungannya ada *related*-nya gitu loh ya dan di sini kan semua juga merasakan juga. Makanya, Pak Menteri kami ini sangat senang dengan Pak Menteri. Pak Menteri lebih memperhatikan kami juga program-program ini ya. Jadi, itu jangan sampai ya kita tidak diperhatikan.

Yang ketiga adalah saya tahu Pak Menteri ini lagi terkenal belakangan ini. Di mana-mana terkenal, Pak ya. Calon Wapres atau apa saya nggak tahu, tapi apakah itu dalam rangka meningkatkan elektabilitas terkenal sekali Kemenperin ini soal Kemenprin 3 2021, Pak. Ini kan bikin rame di pasar, di industri Pak. Gonjang ganjing, serang menyerang ya yang kita justru nggak tahu *juntrungannya* dari mana, tiba-tiba Pak Menteri keluar tidak ada sosialisasi ke kami gitu loh.

Apa maksud Permenperin 3 2021, terlepas dari pro dan kontra. Tapi, saya mengharapkan waktu menyusun Permenperin, itu tidak menimbulkan gejolak Pak, tidak menimbulkan efek ke masyarakat. Ini poin penting yang ingin kita rasakan. Salah satunya adalah dia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 3 2021, 2014 Pak gitu. Maka, coba di analisis kembali, ada nggak yang bertentangan misalnya dengan asas-asas, di Undang-Undang 3 2021. Asas yang saya lihat di sini, pemerataan persebaran. Ini bagaimana menjelaskannya. Pemerataan persebaran di Jawa Timur yang saya denger nggak ada, ya kan. Pesebarannya nggak ada. Kalau kita lihat penjelasannya, ini sudah jelas tuh.

Kemudian, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat. Ini harus dijelaskan kepada kami. Jangan sampai bertabrakan, kalau menurut konsepnya *morality of law* dari Lon Fuller bagi orang hukum yang belajar, itu jelas harus mengandung sesuai dengan prinsip *morality of law*, Pak Lon Fuller, *no contradiction*.

Sebentar, saya tadi minta 15 menit.

**KETUA RAPAT:**

Karena, ini *anu*. Aturan dari.

**F-PDIP (DARMADI):**

Betul betul betul.

**KETUA RAPAT:**

Bu Puan Maharani yang ngatur di sini 3 menit.

**F-PDIP (DARMADI):**

Iya, saya tuh minta tidak ada tabrakan dengan undang-undang atau apa. Ini tabrakan dengan Permendag juga, walaupun selevel, jangan sampai lah ini bertabrakan Permendag. Bapak bilang tanpa rekomendasi, *pot of* kedatangan, tanpa rekomendasi. Di Permendag harus rekomendasi. Permendag 14, 2020 Pasal 13 Ayat 5 dan 17 Ayat 1. Jadi, ini ada tabrakan Pak.

Nah, mohon ditinjau kembali, di evaluasi kembali ya. Kalau memang ada yang bisa direvisi, direvisi kembali Pak Menteri. Itu harapannya dari kami, sehingga ini lebih *clear* tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

Itu yang kemudian yang terakhir adalah bahwa kami mau minta memang nanti RDP ya untuk detail ini, Pak. Mohon yang Ibu Gati punya Dirjen ini, IKMA ini, mohon lebih diperhatikan Pak. Ini ke pesantren ini sangat berguna kata Pak Nasim tadi, jadi itu menjadi atensi kami ke depan, Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih.

Kalau bisa kita fokus pada anggaran ya. Karena, kita rapat anggaran. Sehingga, kita bisa cepat ini apa rapat kita.

Pak Lamhot, tolong perhatikan sarannya Bu Puan Maharani. Ada suratnya ke sini, itu 3 menit Pak diisyaratkan di sini untuk rapat-rapat sekarang ini.

**F-P. GOLKAR (LAMHOT SINAGA):**

Mudah-mudahan enggak sampai 3 menit.

**KETUA RAPAT:**

Iya jadi, walaupun beda ini. Saran beliau tetap kita perhatikan 3 menit aja. Hal-hal yang lain, nanti kita bicarakan di RDP aja, kalau ada masih kurang rasa-rasanya di RDP aja.

**F-P. GOLKAR (LAMHOT SINAGA):**

Kalau sarannya, kalau sarannya Pimpinannya Pak Darmadi pasti saya perhatikan, Pak. Mudah-mudahan beliau juga begitu.

Terima kasih.

**Pimpinan,  
Bapak, Ibu Komisi VI yang saya hormati,  
Pak Menteri,  
Para Eselon I,  
Jajaran Kementerian Perindustrian,**

*Minal aidin wal faizin*, mohon maaf lahir dan batin.

Pertama-tama, saya ya sama masih sama sikap saya seperti dulu, Pak Menteri kalau membahas RKL Menteri Kementerian Perindustrian ini rasanya prihatin aja ininya gitu, yang diurus banyak, anggarannya cuman 2,6 triliun. Ini Pak sama dengan anggaran APBD di kabupaten saya Pak, ini.

Padahal di kabupaten saya yang di urusannya ratusan ribu orang gitu, yang diurus oleh Kementerian Perindustrian jutaan, puluhan juta malah dan juga ke jantung ekonominya sangat berpengaruh *multiplayer* efeknya. Tapi, saya nggak tahu bagaimana nanti postur anggaran kita seperti ini. Mudah-mudahan ini perhatian kita, juga paling tidak perhatian daripada pemerintah ke depan.

Bahkan di sini saya lihat tadi usulan Kementerian Perindustrian untuk penambahan pagu indikatifnya 2,6, usulan tambahan 1,366 hampir 50% ininya usulan tambah. Saya kira kalau usulan saya, diminta diminta sama 100% pun dari pagu indikatif, saya kira kita dukunglah dari Komisi VI begitu, dari usulannya ini. Karena, ini banyak hal yang diurus. Itu yang pertama.

Yang kedua soal dari tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya kira sangat menyentuh semua sektor industri kita, bagaimana industri kita ini bisa berkembang baik. Tapi kemudian, saya ingin mengusulkan Pak Menteri supaya mempunyai atensi khusus terhadap industri-industri pionir kita yang sekarang sedang kita rencanakan ini.

Kalau kita lihat dari pohon industri kita Pak, masih banyak pohon industri kita ini yang masih bolong-bolong itu khususnya ini di Direktorat Industri Kimia dan yang menyangkut *petrochemical*. Kita tahu memang persoalannya ini adalah dilihatnya adalah hak harga gas yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, saya mengusulkan supaya Kementerian Perindustrian secara proaktif juga

membahas di pemerintah bahwa industri gas untuk bahan baku industri dan khususnya gas untuk industri pionir supaya diberikan *affirmative price*.

Nah, ini bagaimana skemanya, bagaimana caranya saya nggak tahu. Mudah-mudahan nanti kementerian, melalui Kementerian Perindustrian bisa merumuskan dan kemudian membawa ini ke kepada kebijakan pemerintah kita supaya ini tumbuh, Pak. Kalau ini nggak bisa kita lakukan, saya kira tidak sampai kapan pun tidak akan bisa kita dorong tumbuhnya industri-industri pionir. Karena, kita tahu industri-industri kita sekarang ini masih banyak yang bolong.

Kemarin dengan Pertamina juga selalu saya katakan, Pak. Bagaimana caranya kilang itu diintegrasikan dengan *petrochemical*. Nah, ini kaitannya juga program yang ada di Kementerian Perindustrian. Bolong-bolongnya industri, pohon industri kita sekarang kita ini harus kita isi. Mumpung kita masih punya gas, masih punya migas, kita tumbuhkan industri daripada turunan daripada industri pionir kita ini dan Bapak Presiden kita ini selalu mengatakan bahwa kita mendorong hilirisasi daripada industri kita.

Nah, oleh karena itu, saya melihat tadi di dalam paparan kaitannya terhadap pagu indikatif ini, sudah mencakup ke arah sana, tapi kemudian adalah bagaimana rumusan supaya industri pionir kita ini bisa tumbuh kembang kaitannya terhadap harga gas kita yang kompetitif dan adanya *affirmative price* terhadap gas untuk bahan baku industri. Ini yang saya mohon didorong oleh Kementerian Perindustrian.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Abdul Hakim.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Izin, matur suhun Pimpinan. 3 menit, Pimpinan ya.

**KETUA RAPAT:**

Iya, anak muda biasanya cepat.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Siap.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Iya ini, lupa kan.

**Yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang hadir secara fisik maupun virtual,**

**Yang saya hormati Pak Menteri Perindustrian,**

*Minal Aidin Wal Faizin.* Akhirnya berjumpa Pak, saya kemarin masih virtual.

Pak saya mau tanya, Akademi Teknik Kulit masih di Perindustrian ya, yang di Jogja itu? Berarti anggaran 969 miliar ini yang untuk pendidikan salah satunya untuk untuk itu. Nah berarti saya nitip Pak, fokus dari Kementerian Perindustrian itu, itu juga tolong diperhatikan industri kulit kita Pak. Jadi, kualitas kulit kita ini kalau dibandingkan dengan negara-negara luar, itu kita enggak kalah Pak.

Hasil-hasil, hasil olahan dari pada sapi Jawa khususnya, itu disandingkan dengan kulit-kulit dari luar, itu kita di peringkat atas. Itu pernah saya sampaikan sebelumnya ketika Pak Menteri hadir secara virtual, saya nitip itu. Itu tolong diperhatikan. Nah, ketika memperhatikan di industri perkulitan itu, diperhatikan mulai dari hulu sampai hilirnya. Berarti kalau bicara hulu, berarti di peternakan, kemudian di pengepul, kemudian di pengolahan kulit jadinya, sampai dengan *finish good* nya. Jadi, setiap *stage*, setiap tahapan, itu tolong diperhatikan. Saya nitip itu yang pertama.

Kemudian kedua Pak, saya ingin menanyakan terkait hampir sama seperti Pak Darmadi tadi, Permenperin 3/2021. Disitu dijelaskan yang untuk industri rafinasi, itu bisa apa melakukan impor kalau misalnya izin usahanya sebelum 25 Mei 2010, kemudian yang GKP setelah 25 Mei 2010. Nah, saya cuman penasaran aja Pak, itu dasar penentuan tanggalnya seperti itu tuh bagaimana Pak ya. Karena, kami takutnya nanti dari produk hukum yang Bapak keluarkan ini, ada apa, ada cacatnya atau ada berdampak yang kurang baik untuk baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari pelaku industri tersebut.

Kemudian kami juga mengingatkan, jangan sampai dari Permen ini itu bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014, Pak tentang perkebunan oleh perusahaan industri gula. Di situ di Pasal 74 Ayat 1, dijelaskan setiap usaha pengelolaan hasil perkebunan tertentu yang bahan bakunya impor, wajib punya lahan yang apa minimal 3 tahun berjalan dia harus mengelola lahan itu. Nah, mudah-mudahan, pengawasan daripada Kementerian Perindustrian untuk beberapa industri-industri perkebunan yang melakukan impor, itu juga menjalankan amanah Undang-Undang 39 Tahun 2014 ini.

Saya 2 poin itu aja, Pimpinan. Sukses terus untuk Kementerian Perindustrian. Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



**KETUA RAPAT:**

Iya, kalau bisa kita tersendiri lagi bisa dibahas juga itu tentang apa perundang-undangan. Sekarang, kita bahas anggaran. Pak, Pak Heru, Pak siapa nama Bapak, nama lengkapnya? Saya Pak Heru aja saya ingatnya.

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Saya Sumarjaya Linggih, nama saya. Disingkat menjadi Dammer.

Terima kasih, Pak Dammer.

**Bapak Ibu sekalian,  
Yang terhormat Anggota Komisi VI,  
Pak AGK, Menteri Perindustrian dan seluruh Eselon I yang hadir di rapat hari ini pertama,**

Pertama tentu saya juga turut kurang puas dengan pagu indikatif 2022, yang sebetulnya kalau mau lihat pagu indikatif 2020 ke 2021 ada kenaikan sedikit. Kemudian turun lagi di 2022, oleh karenanya menjadi kesimpulan nanti Pak Dammer bahwa kita mendorong untuk tetap sesuai harapan kita bersama bahwa pagu indikatif 2022 harus didorong lebih besar dari anggaran 2021, karena kalau melihat cakupan dan tanggung jawab lingkup kerja Kementerian Perindustrian saya kira sangat kurang rasional, jika hanya disediakan 2,6 triliun. Cakupannya besar, tanggung jawabnya besar, bahkan di era pandemi ini harus mendorong terhadap kekuatan baru, supaya industri tetap *survive* di era tekanan pandemi Covid-19. Ini menurut saya yang utama pada hari ini.

Yang kedua, saya juga slentingan mendapatkan informasi bahwa Kementerian Perindustrian akan digeser ke Komisi VII, yang secara komprehensif sebetulnya tidak ada hubungan langsung di situ. Karena, kalau melihat *history call*-nya bahwa Perdagangan dan Perindustrian itu salah satu sisi yang tidak bisa dipisahkan, seperti mata uanglah nggak bisa dipisahkan.

Yang kedua, kalau melihat besaran anggaran di Komisi VI ini, anggarannya kecil. Sekarang 2,6 triliun, Perdagangan hanya 3 triliun, Kementerian Koperasi pagunya 1,4 yang sebelumnya cuma 980 miliar. Kemudian, Menteri BUMN hanya 400 miliar, Pak anggarannya. Di sana, satu kementerian 10 triliun, Pak gitu. Kemudian, lembaga-lembaga itu BRIN itu 30 triliun, Pak anggarannya. Jadi, kalau melihat dari perspektif anggaran yang itu menjadi tanggung jawab pengawasan oleh Komisi VII, saya kan pernah di VII gitu ya. Itu sebetulnya lebih besar di sana daripada di sini.

Di sini lebih banyak membicarakan tentang kebijakan, kemudian tentang situasi dan masalah, permasalahan di lingkup kerjanya masing-masing. Di sana mengawasi anggarannya saja besar, belum lagi kalau berbicara persoalan turunan SKK dengan BPH Migas, misalkan. Maka itu, menurut saya tidak ada alasan untuk Kementerian Perindustrian itu pindah ke sana, apalagi kalau hubungannya perindustrian ini sebagai, kan kalau SD-nya itu

adalah Kementerian Koperasi UMKM itu, SD itu Sekolah Dasar, Pak. Kalau sudah SMP, SMA itu binaannya ya Kementerian Perindustrian.

Terus, bagaimana kita akan meng, melakukan *connectivity* antara Kementerian Koperasi UMKM dengan Kementerian Perindustrian gitu. Kan nggak ada di sana membina tukang bakso, tukang cireng, tukang kan nggak ada. Tapi, kalau tukang bakso, dia sudah jadi industri pabrik bakso, ya adanya disini gitu dan ini ada hubungannya gitu. Terus disana, lingkupnya pertambangan energi, nggak ada hubungannya Pak gitu. Nah, ini yang menurut saya, argumentasi inilah yang harus kita pertahankan, bukan hanya kemudian bahwa komisi itu harus bermitra dengan 3 komisi, 4 komisi, ah 4 kementerian, 3 kementerian, bukan itu persoalannya. Pertama dalam perspektif anggaran. Kalau anggarannya kecil-kecil seperti ini ya, sebetulnya tidak ada alasan untuk dipindah. KLHK anggarannya 10 triliun, Pak gitu. Ya kalau dipecah 2, ya 5 triliun besar gitu.

Nah, yang yang kedua tadi, hubungan antar kementerian inilah yang harus dilihat gitu. Nah terus, Kementerian Perindustrian sedang butuh perluasan Kawasan-kawasan industri, terputus hubungannya misalkan sistem pengawasan dan keputusan-keputusan politik dengan Kementerian Investasi yang baru dibentuk oleh pemerintah, ini juga menyulitkan, Pak. Keputusan nanti di sana lain, di sini lain juga gitu.

Nah karena itu menurut saya, Pak AGK tidak ada alasanlah untuk ke sana. Mumpung masih ada waktu 3 tahun, ini prestasi untuk Pak AGK sebagai alumni DPR yang menjadi kebanggaan kita bersama untuk juga membangun kebersamaan agar lebih sukses daripada menteri-menteri lainnya, kan kalau menteri dari DPR-nya sukses, kita juga sebagai Anggota DPR bangga gitu ya. Bahwa selama sekolah di DPR itu bisa menorehkan prestasi di kementerian.

#### **KETUA RAPAT:**

Maksudnya Pak Menteri, kalau SBY naik, dia menteri gitu ya.

#### **F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Kalau itu tergantung Pak AGK, kalau itu. Kita sedang menunggu kabar baik memang.

Saya kira tidak banyak hal yang ingin saya *endorse* sesuai dengan batasan yang disampaikan oleh Pak Dammer. Jadi, perspektif anggaran kita harus tetap, memang sepengetahuan saya, sepengalaman saya, agak sulit untuk kita mendorong, meng-*endorse* anggaran di kementerian. Tetapi, jangan pernah putus asa dengan ini, karena suatu saat dengan *reasoning* yang kuat, dengan situasional yang memungkinkan untuk kita bisa untuk mendorong anggaran ini, suatu saat kita bisa terbukti dan juga buat pemerintah buat Pak Menteri dan kawan-kawan di pemerintah, juga jangan pernah bosan untuk memperjuangkan di tingkat eksekutif gitu.

Jadi, keputusan politiknya kami lakukan di sini, keputusan politik itulah yang dibawa kepada rapat-rapat di tingkat eksekutif, Jangan pula keputusan kita mengendap hanya sampai keputusan di tingkat komisi, sehingga kalau kemudian eksekutif bisa mem bahas nya, kami juga bisa mendorong nya melalui teman-teman yang ada di Badan Anggaran. Kalau ini *matching*, bisa ketemu. Saya sih membayangkan ke depan, Menteri Perindustrian itu anggaranya minimalnya 15 triliun, Pak baru ke lihat Pak begitu, untuk meningkatkan performa dan kinerjanya itu akan kelihatan.

Karena, hanya dengan anggaran 2,6 melahirkan kebijakan, agak sulit apalagi di era pandemik. Jadi, *take off* nya harus kita dorong semenjak ada persoalan saat ini, dan di tangan Pak AGK mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan.

Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan niat baik kita bisa terwujud.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Ya, setuju 15 triliun itu karena saya bilang tadi itu. Sekarang ini, perindustrian sangat apa sangat berperan bagi masa depan untuk apa menyelesaikan *problem* tenaga kerja kita. Apalagi kita bahan baku kita melimpah betul di Indonesia, di bawah tanah ada, di atas tanah ada, di laut ada, semuanya lengkap gitu bahan baku kita. Sehingga, ini sangat memungkinkan kita memenangkan persaingan secara internasional.

Selanjutnya, Pak artis Tommy Kurniawan. Ke anggaran dulu ya, anggaran ya. Kalau bisa fokus anggaran ya.

#### **F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):**

Cuma sedikit kok, Pimpinan.  
Terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati,  
Rekan-rekan Komisi VI yang saya hormati,  
Pak Menteri Perindustrian yang saya hormati beserta dengan seluruh jajarannya,**

*Minal aidin wal faizin*, mohon maaf lahir dan batin.

Terima kasih atas pemaparan mengenai masalah anggaran. Saya kira kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga setuju Pak, anggaran ini turun jadi terlalu kecil, karena memang industri membutuhkan apa namanya, membutuhkan anggaran yang sangat besar, apalagi sekarang eranya sudah berubah banyak industri-industri baru yang harus diperhatikan. Saya kira kami setuju, mudah-mudahan Komisi VI bersama dengan Kementerian Perindustrian bisa mewujudkan hal tersebut, Pak.

Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih, program-program dari Kementerian Perindustrian yang sudah, sudah kami jalankan di dapil, *alhamdulillah* sangat bermanfaat. Mudah-mudahan anggarannya terus bisa dinaikkan, sehingga manfaatnya bisa lebih banyak, Pak.

Kemudian, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai masalah BPSDMI, Pak. Masalah BPSDMI ini, kalau saya lihat secara tupoksi ini kan anggarannya, anggarannya menurun ya Pak ya. Nah kemudian, dari waktu ke waktu kami tuh tidak mendengar apa namanya hasil dari kerja BPSDMI ini. Kira-kira dari anggaran 1,4 sekarang turun jadi 900 itu karena apa. Apakah karena memang *output*-nya yang kurang baik, atau misalkan kinerjanya yang kurang baik, atau apa Pak. Mungkin, bisa dijelaskan.

Nah, kemudian, kalau saya baca di sini tupoksinya itu mengembangkan, menyediakan, memfasilitasi, membina SDM industri yang berkualitas. Nah di sini, kami melihat Pak cakupannya mungkin bisa dipertimbangkan untuk diperluas, jangan hanya politeknik dan di SMK saja. Mungkin, bisa diperkuat ke lembaga lainnya, seperti pesantren Pak. Karena, banyak juga talenta-talenta apa namanya pesantren yang bisa dikembangkan menjadi manusia industri yang lebih baik atau lembaga-lembaga lainnya.

Saya kira mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, Pimpinan. Terima kasih.

*Wallahumafiq Aqwamith Tariq.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Oke, lanjut ke virtual. Belum ada di sini. Saya perpanjang dulu ya, karena tadi jam 3 janjinya. Saya perpanjang sedikit ya, 15 menit ya.

#### **(RAPAT: SETUJU)**

#### **F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Saya singkat aja, karena ini kita fokus di anggaran kan. Jadi, ya saya setuju bisa menerima penjelasan dari Pak Menteri mengenai kebutuhan anggaran dan juga kebutuhan penambahan anggaran ke depan, Pak ya kan. Namun demikian, saya ingin mempertanyakan juga hal-hal yang tadi sudah ditanyakan teman-teman, sebenarnya program dari kementerian Bapak tadi itu kan banyak sekali di dipaparkan ya mengenai ini aja, mengenai Badan Pengembangan SDM yang kata Mba apa, Mas Dar tadi itu apaan sih, katanya nggak banyak berguna bagi kita, anggaran IKM dipotong.

Sebenarnya saya melihat di sini, banyak sebenarnya yang bisa disinergikan dengan Komisi VI. Banyak banget lebih dari IKM, tapi tidak pernah selama ini disinergikan dengan kita. Bayangkan Bapak punya sertifikasi, Bapak punya 9 SMK, Bapak punya 10 politeknik, 2 akademi komunitas, nggak satu pun dari program ini yang disinergikan dengan Komisi

VI, Pak Menteri. Nah, ini harus ke depannya ini harus diperhatikan, Pak Menteri. Kita kan juga kepengen orang-orang dapil kita mendapatkan sertifikasi, masa sekarang kita bisa mengupayakan sertifikasi konstruksi, paker, satpam dari Komisi V PUPR, ya kan dapatnya dari sana.

Sementara dari kementerian kita sendiri, yang sebenarnya banyak program-program itu dan anggaran yang cukup besar, nggak ada satu pun yang di-*share* ke kita untuk dapil kita, Pak Menteri. Jadi, tolong ini di apa namanya di diperhatikan juga.

Kemudian, saya juga ingin tahu sebenarnya kan ini ada anggaran proposal untuk 2022, Nah, 2021 itu kan Bapak punya badan baru ya, badan baru yang namanya BSKJI. Sebenarnya itu adalah dari organisasi daripada BPPI, ya kan. Saya hanya ingin tahu saja, karena di sini kan anggarannya besar Pak, anggaran badan ini itu sangat besar.

Saya ingin tahu saja Pak, capaian apa yang sudah dicapai di tahun 2021 ini, Pak. Karena, pada waktu presentasi dulu di waktu kita, kita kan juga pernah yang namanya apa namanya istilahnya konsinyering ya. Banyak hal-hal yang kita bicarakan pada saat konsinyering, apa-apa yang bisa disinergikan dengan kita Komisi VI. Sekarang sudah bulan Juni, nggak ada perubahan Pak Menteri. Tidak pernah ada dari dirjen-dirjen itu memberikan apa namanya program-program mereka ke sini. Jadi, untuk apa kita konsinyering kalau nggak ada implementasinya gitu.

Saya berharap ke depan ini raker kita, ya kan dan ini itu ada ada ada terlihat hasil dari pertemuan. Jadi, jangan cuman ketemu-ketemu tapi nggak ada hasilnya Pak Menteri. Tolong Bapak instruksikan kepada para dirjen Bapak, apa yang kita bicarakan di raker itu itu diimplementasikan dong, jadi jangan ngomong-ngomong aja, tapi nggak ada *follow up*-nya.

Saya rasa demikian, Pak Menteri. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya, nanti gini Pak diinfokan aja ke temen-temen, karena posisi kita adalah pengawal. Jadi, diinfokan nanti apa-apa yang menjadi kegiatan Bapak Ibu yang ke masyarakat kalau memungkinkan ada diinfokan, kalau di dapilnya bisa datang mungkin datang itu ya. Kalau pas dapilnya ada acara, diinfokan aja sehingga bisa datang, tanpa tanpa biaya dari kementerian ya, karena sifatnya mengawal nanti, Bu. Kita ikut mengawal ya.

#### **F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Bukan, ini bukan untuk mengawal Pak. Yang saya maksudkan tadi itu beda sekali. Semua komisi itu, semua departemen itu punya program, kementerian punya program sertifikasi.

**KETUA RAPAT:**

Iya iya itu.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Dan setiap anggota di komisi lain Pak Dammer, itu mendapatkan program tersebut. Tetapi kita, begitu banyaknya program sertifikasi dari Kementerian Perindustrian nggak ada dirjen-dirjennya *share* ke kita untuk dapil kita, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Gini, Bu.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Gini.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Jadi, bukan soal pengawasan saja Pak Dammer. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Bukan pengawasan, bukan meminta tidak, jadi begini. Pada prinsipnya itu, boleh Ibu ada aspirasi di daerah, Ibu kawal ke ke dirjen masing-masing. Jadi nanti, Pak Dirjen masing-masing menginfokan apa-apa menjadi programnya ya. Posisi kita bukan pada posisi meminta, jadi posisi kita adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat, terus kemudian kita mengawalnya, kemudian menyampaikannya kepada dirjen dari program-program yang ada pada dirjen. Silakan.

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Yang BPS, BPSDMI boleh tau nggak yang mana ya.

**KETUA RAPAT:**

Pak Arus.

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Arus. Nggak pernah tuh kita hubungan tuh, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya, nanti digini ya. Ini waktunya cukup mepet nih.

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Kalau bisa Bapak proaktif sedikit. Ya, selamat pagi Pak, itu kan bisa.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Dammer, Pak Dammer. 1 menit, Pak Dammer.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Mohon izin, Pak Menteri yang kami hormati. Mohon maaf lahir batin.

Kalau kita cermati di dalam *slide-slide* yang disusun oleh Pak Menteri ini, soal masalah BPSDM supaya nggak jadi ricuh dan fitnah. Itu kan fungsi pendidikan, kalau memang fungsi pendidikan itu ya nggak bisa digeser tempat lain. Kenapa dia lebih banyak dari tempat yang lain, karena sudah dihitung dalam akumulasi amplop besar bagian dari 20% dana APBN yaitu adalah alokasi fungsi pendidikan. Jadi, dana alokasi fungsi pendidikan itu tidak hanya yang menempel di Kemendikbud dan di Kemenag, tapi juga ada yang menempel di kementerian teknis seperti di BPS, ada politeknik statistic. Nah, kebetulan di tempat kita ini ada beberapa politik industri yang spesifik. Karena itu, anggarannya lebih tinggi daripada tempat lain.

Nah, perkara masalah sertifikasi dan sebagainya. Ini kan bagian dari *all in, 3 in 1*. Pelatihan, *training*, kemudian sertifikasi, sama *placement* bagian dari itu. Nah, bukan kemudian sembarang orang yang belum di *training* langsung dikasih sertifikasi. Memang bukan.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Mohon, kita juga nggak bodoh, Pak Nusron. Masa sembarang orang dapat sertifikasi. Emangnya kita orang bodoh apa.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Karena memang yang di-*training* di tempat ini, yang di tempat ini itu *3 in 1* nya. Bukan yang di-*training* tempat lain.

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Jadi, Pak Nusron ini bukan bukan kementerian.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Sebentar, saya mencoba menjelaskan supaya ini *clear*. Karena, ini fungsi pendidikan ya kan. Karena, fungsi pendidikan jangan kemudian dikritisi, kenapa ini lebih banyak, kenapa ini lebih sedikit. Bukan di situ levelnya.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Saya kira itu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke, nanti mungkin ada usulan-usulan dari temen-temen yang mau dididik di apa dilatih, mungkin itu sangat diperhatikan ya Pak, Pak Agus.

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Ya minimal disosialisasi ke kitalah. Apa itu, barang apa itu.

**KETUA RAPAT:**

Nanti ya, apa yang nanti akan dididik, apa yang ini, tolong disosialisasi. Nanti sehingga nanti mungkin ada konstituennya Bu Evita mau.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Saya males kalau ngomong begini, Pak Dammer. Nggak yang saya maksud, itu jangan dikekananin jangan dikekiriin yang saya maksud. Yang saya maksud itu adalah begitu banyak program yang kita bicarakan ketika kita rapat kemarin ini, konsiyering, sampai sekarang sudah bulan Juni, nggak ada satu pun tuh dari dirjen-dirjen yang disinergikan dengan kita.

Perindustrian, hanya satu program, IKM saja yang kita dapat, dari, dari, dari Komisi VI. Sebenarnya, program pross, kalau saya ulas satu-satu makan waktu panjang. Saya minta Bapak-bapak aja pengertian bahwa kita ini sumpah jabatan kita ini, membawa aspirasi ke dapil. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan itu, berikan kepada kita. Itu yang saya minta

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Pak Dammer, 30.

**KETUA RAPAT:**

Ya, 30.



**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Jadi, jangan dikanan kananin, kalau saya ngomong deh.

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Solusi aja solusi, saya kira nanti kita jadwalkan sekaligus mendalami ini, sambil evaluasi yang 2021. Saya kira itu aja.

**KETUA RAPAT:**

Ya ya oke, kita jadwalkan nanti.

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Jadi, tidak harus diperuncing, dipertajam dan lain-lain.

**KETUA RAPAT:**

Sekretariat dijadwalkan ya untuk pendalaman tentang program-program yang ada di Kementerian Perindustrian. Kemudian, nanti kita akan dalam ya. Sambil evaluasi yang 2000, sambil yang Pak Menteri nanti mungkin sambil evaluasi yang 2021, mungkin kita bikin RDP dengan eselon Bapak, sambil kita melihat program-program 2022. Kalau evaluasinya masih bisa sempat kita lakukan nanti, kalau memang ada, masih sempat kita lakukan di 2021 ini. Toh masih ini anggaran masih berjalan yang belum.

Di virtual, Pak Rapsel sama Pak Rafli saya lihat ini. Tolong, singkat ya. Karena, ini sudah lebih lagi ini. Sudah harus diketok lagi 15 menit. Pak Rapsel, nggak ada. Pak Rafli, udah nggak ada. Oke, langsung sekarang Pak Menteri sekarang, silakan menjawab kalau ada hal-hal lain. Terutama fokus kepada anggaran, Pak ya. Karena, ini waktunya sudah mepet Pak.

**MENTERI PERINDUSTRIAN:**

Baik, pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh Anggota Komisi VI yang telah menyampaikan pandangan, masukan dan dukungan bagi kami di Kementerian Perindustrian, khususnya berkaitan dengan usulan baru untuk bisa melengkapi dan menyempurnakan dan juga mendukung upaya kita bersama untuk agar supaya pertumbuhan di sektor industri manufaktur bisa lebih cepat.

Kami sudah menghitung-hitung hanya, Pak Herman, hanya dengan tambahan anggaran yang baru saja kami usulkan yang 11 program super prioritas dan juga program pendukung. Kalau itu nanti disepakati ya baik itu oleh Banggar maupun oleh Kementerian Keuangan.

Kami sudah mencoret-coret ya sekitar nanti bukan sekitar, nanti pada tahu 2023, kontribusi dari sektor industri manufaktur yang sekarang sudah

paling tinggi terhadap PDB ekonomi, PDB nasional yang sekarang sudah sekitar 18,9 ya. Kami yakini bisa sampai kepada titik 20%, kontribusi dari industri atau sektor industri manufaktur bagi PDB nasional sampai 20%, hanya dengan tambahan 1,3 sekian triliun yang barusan kami usulkan, ya yang barusan kami usulkan.

Ada beberapa, ada beberapa target ya misi sebetulnya, misi besarnya pasti berkaitan dengan program substitusi impor. Ini kebetulan sekali program substitusi impor kami, kami tetapkan pada tahun 2022 35% dan ini membahas pagu indikatif tahun 2022 yang tentu pasti akan *in line* dan tentu akan membantu pekerjaan dari kita dari kami semua untuk bisa mencapai target kita 30% untuk substitusi impor.

Nah, kemudian yang kedua, Pimpinan dan Anggota Komisi VI. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya agar kami Kementerian Perindustrian masih bisa tetap menjadi mitra Komisi VI ya, menjadi mitra Komisi VI dan kami tentu akan lebih senang apabila kami bisa tetap bermitra dengan Komisi VI, karena kami semua sudah saling mengenal ya, apalagi Mbak Evita ini walaupun dia, Beliau ini seperti itu, tapi sebenarnya hatinya baik sekali ya.

Saya udah kenal beliau, baik sekali dan semua yang disampaikan walaupun dengan cara yang berbeda-beda ya, dengan cara yang berbeda-beda pasti juga punya tujuan baik, tujuan baik untuk membantu kami di Kementerian Perindustrian, dan kami juga tentu dari Kementerian Perindustrian, dari pemerintah, apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Herman, saya pernah duduk di sebelah artinya menjadi bagian dari DPRRI. Jadi, saya paham sekali terhadap keperluan dari, dan ini, dan ini sah-sah saja tidak ada aturan yang dilanggar ya untuk seluruh Anggota Komisi VI bisa bisa menangkap aspirasi yang ada di dapilnya ya, kemudian membina masyarakat yang ada di dapilnya khususnya berkaitan dengan sektor industri manufaktur, entah itu IKM, entah itu program-program lain.

BPSDMI, BPSDMI ini yang tadi sudah, terima kasih untuk Pak Nusron, ini mungkin karena menterinya Golkar. Jadi, beliau juga mempunyai apa keterpanggilan untuk menjawab, tapi jawaban dari Pak Nusron itu tepat sekali. Karena memang, ini berkaitan dengan sektor atau apa anggaran yang diberikan untuk pendidikan. Besar, tadi ada disampaikan bagaimana dengan *output*-nya. *Output*-nya dari BPSDMI bisa kami laporkan, tidak ada satu pun lulusan dari BPSDMI baik itu melalui program 3 *in* 1, melalui program dual sistem, maupun dari arah SMK, Politeknik yang tidak diserap oleh industri, tidak ada satu pun lulusan SMK kami, Politeknik kami yang nganggur, tidak ada sama sekali.

Karena apa, karena memang sejak awal silabus, materi pendidikannya itu dibicarakan bersama-sama dengan industrinya. Sehingga, betul-betul merupakan sebuah kebutuhan dari industrinya itu sendiri ya. Jadi, ada program 3 *in* 1, ada program dual sistem. Nah, bagaimana kita bisa bekerja sama antara kami di Kementerian Perindustrian dengan yang terhormat Anggota Komisi VI sebagai, sebagai perwakilan di dapil masing-masing. Bisa

kami sampaikan misalnya di sini ya. Kami punya 90, kami punya 90 SMA-SMK, 10 Poltek dan 2 Akom. Itu sistem seleksi bagi calon-calon siswanya itu bisa berpartisipasi Komisi VI ya dari daerah masing-masing.

Dan jangan lupa Bapak, Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat, kami juga bukan hanya memperhatikan SMK yang ada di lingkup atau Poltek yang ada di lingkup Kementerian Perindustrian, bukan. Banyak juga SMK-SMK lain yang kami kerja samakan ya. SMK-SMK yang tidak ada di bukan bukan ada, bukan dari APBN kita, bukan dari anggaran kita. SMA-SMK yang dari apa Pemda dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita perhatikan, kita seleksi, kita seleksi para murid-muridnya, calon-calon yang akan kita bisa masukkan ke program-program BPSDMI dan kemudian kita salurkan ke industri-industri yang memang membutuhkan. Jadi, ruang untuk kerja samanya besar sekali, ruang untuk kerja samanya besar sekali. Kenapa harus, saya kira ini kita bisa mengerti apa yang menjadi, menjadi inspirasi dan aspirasi ini wajar saja karena memang,

### **Yang terhormat Anggota Komisi VI,**

Ini juga diberikan amanah, diberikan tanggung jawab untuk membina dapil masing-masing, termasuk anak-anak muda kita yang harus kita didik sebagai sumber daya industri, sumber daya manusia industri yang mumpuni, yang sesuai dengan kebutuhan industri.

### **Saya kira, Bapak Pimpinan yang kami hormati, Seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,**

Itu yang bisa kami jelaskan. Kami siap untuk bisa melakukan pendalaman dari apa yang telah saya sampaikan tadi, bisa secara mikro dibahas dengan para pejabat Eselon I ya secara tematik, secara detail dan berkaitan dengan Permenperin 3, kami juga siap untuk melakukan rapat khusus untuk menjelaskan supaya jelas, tapi intinya untuk Permenperin 3 ini untuk introduksi saja bahwa kami percaya bahwa *Insyah* Allah, *Insyah* Allah tidak bertentangan dengan Undang-Undang 3.

Kemudian juga dalam membahas Permenperin 3, dilakukan harmonisasi yang dilakukan oleh Kemenkum HAM. Di mana semua *stakeholder* juga terlibat, Menteri Perdagangan terlibat, semua *stakeholder* terlibat. Nah jadi, yang untuk 2010 itu detail nanti ya kenapa 2010 ininya apa patokannya 2010, itu juga bisa kami jelaskan. Yang pasti yang bisa kami sampaikan dalam, dalam beberapa pernyataan-pernyataan bagi *stakeholder* yang memang relevan.

Saya sampaikan lagi dengan tegas *stakeholder* yang relevan ya. Mereka menyampaikan, bahkan mendukung Permenperin 3 ini, ya bahkan mendukung. Bahkan terakhir dua minggu yang lalu, saya kira itu sudah merupakan gongnya, di mana Pemda Jawa Timur menggelar 1 rapat yang juga mengundang seluruh *stakeholders* relevan ys, di mana dalam keputusan rapatnya tersebut ya kesimpulannya adalah, Permenperin 3 itu tidak bermasalah, tidak ada masalah, tidak ada petani yang dirugikan, tidak ada

industri kecil menengah makanan minuman di Jawa Timur yang dirugikan ya. Nah ini, ini, ini, bukan kata saya, ini kata, ini hasil dari rapat koordinasi yang kami hadiri juga. Kementerian Perindustrian juga diundang oleh oleh Pemda, ya oleh Pemda ya kesimpulan rapatnya seperti itu.

Tapi Pimpinan, kami juga siap untuk menjelaskan secara khusus dalam rapat-rapat dalam rapat berikutnya dengan berkait dengan Permenperin 3 ini, dan terakhir sebelum Permenperin 3 ini kami selesaikan, mengenai Permenperin 3, ini sudah kami laporkan kepada Pimpinan Komisi III dan Pimpinan poksi ya, ketika kita semua *dinner* di Hotel Mulia. Saya pernah juga pernah *dinner* di Hotel Mulia dengan seluruh Pimpinan Komisi VI, dengan juga kapoksi-kapoksi dan ini sudah kami jelaskan, sudah kami jelaskan dan sudah mendapat dukungan penuh dari seluruh Pimpinan dan juga kapoksi-kapoksi yang ketika itu hadir dalam pertemuan tersebut.

Saya kira itu, sekali lagi terima kasih banyak atas dukungannya. Mudah-mudahan kesimpulan yang kami sampaikan bisa di ketok, bisa disetujui baik itu oleh Banggar maupun Kementerian Keuangan dan juga mudah-mudahan kami di Kementerian Perindustrian bisa juga tetap menjadi mitra Komisi VI. Sekali lagi terima kasih banyak.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Pak Dammer, Pak Dammer, setengah menit Pak, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Tanya Pak Menteri, di luar sana keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang didukung oleh Komisi X, itu ingin menarik politeknik-politeknik yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, dikembangkan atau diminta untuk dibawah Kementerian Perindustrian dan Kebudayaan. Saya mohon jawaban singkat agar masuk kesimpulan Pak Menteri di dalam rapat ini tentang dukungan politik. Karena, Komisi X-nya mendukung untuk itu.

Terima kasih, Pak Menteri.

**MENTERI PERDAGANGAN:**

Politeknik, SMK yang ada di bawah Kementerian Perindustrian itu sifatnya khusus. Itu menghadirkan semua *stakeholder* terlibat dari mulai pembahasan silabus sampai penyerapan penarikan tenaga kerja. Sehingga apa, sehingga kami khawatir dan kami juga sudah menolak terus terang ya, khawatir kalau semua politeknik, bukan semua, kalau politeknik apapun itu politekniknya dipindahkan ke Kementerian Dikbud Ristek, nanti jiwanya, *soul*

nya hilang Pak. Kemudian, *output*-nya tidak sesuai dengan apa yang selama ini bisa kita jaga. Yang saya sampaikan tadi

**KETUA RAPAT:**

Potensi pengangguran lah itu.

**MENTERI PERINDUSTRIAN:**

Iya, yang saya sampaikan tadi bahwa semua tidak ada satu pun lulusan kami ini yang tidak diserap oleh industri, tidak ada satu pun orang, siswa. Nah saya khawatir, karena karena kita sudah puluh-puluhan tahun ini ngerjain, ngerjakan politeknik ya untuk mempersiapkan sumber daya manusia industri ya. Saya memberikan contoh satu aja, Pak satu keberhasilan. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya ini adalah lulusan politeknik. Yang satu jadi sekjen, yang satu jadi dirjen ya. Jadi, jadi, jadi, apa namanya.

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Jadi, kalau mau jadi sekjen harus lewat politeknik dong.

**MENTERI PERINDUSTRIAN:**

Jadi, kekhawatiran saya kalau pindah ke Dikbud Ristek, nanti *output-outcome*-nya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Menteri?

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Pak Menteri, eh Pak.

**F-PKS (RAFLI):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ini Pak Menteri mau ada acara ratas. Mungkin, nanti lain kali ya.

Pimpinan, sedikit aja.

**F-PKS (RAFLI):**

Pimpinan, 1 menit saja, Pimpinan tolong.

**KETUA RAPAT:**

Tadi Pak Rafli dipanggil-panggil ke mana.

**F-PKS (RAFLI):**

*Please*, mohon maaf mohon maaf sebesar-besarnya. Pimpinan 1 menit saja dengan Pak Menteri.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pak Menteri yang terhormat.**

**Pimpinan dengan teman-teman Anggota semuanya.**

Mohon maaf saya dari tadi nggak mengikuti secara *full* tadi rapatnya. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa waktu yang lalu di masa reses kemarin, ada kelompok masyarakat yang memiliki sekian puluh hektar material marmer. Marmer ini sangat luar biasa, mereka sudah uji coba, sudah bawa ke Jakarta, sekarang sudah dipajang di Mako Brimob, Kelapa Dua. Ini luar biasa. Ingin saya sampaikan begini. Kebutuhan marmer untuk Aceh itu sangat luar biasa, masjid-masjid itu sudah dipesan dari Itali, dari India.

**KETUA RAPAT:**

Intinya apa?

**F-PKS (RAFLI):**

Intinya ingin saya sampaikan, kebutuhan masyarakat itu tidak begitu besar, tetapi efeknya sangat luar biasa. Kelompok masyarakat ini memohon bantuan kepada Kementerian Perindustrian bisa membantu mereka untuk memproduksi marmer tersebut, karena *market*-nya sudah sangat jelas. Di Aceh kebutuhan marmer itu luar biasa.

**KETUA RAPAT:**

Ya, oke oke. Itu nanti permohonan itu ya, oke ya.

**F-PKS (RAFLI):**

Ya, saya ingin menyampaikan itu ke tuanku yang terhormat. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian, karena kenapa, kebutuhan di dalam negeri di dalam daerah sendiri ini.

**KETUA RAPAT:**

Ya, betul. Saya percaya.

**F-PKS (RAFLI):**

Ya ya, Ketua saya percaya Ketua akan akan membantu ini, Pak Menteri juga. Terima kasih.



**KETUA RAPAT:**

Yel yel dulu, yel yel.

**F-PKS (RAFLI):**

Terima kasih semuanya. Salam.

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Yel yel dulu, Ketua.

**F-PKS (RAFLI):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Yel yel, yel yel Ketua.  
Ketua sebentar.

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam.*  
Ya?

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

1 menit.  
Pak Menteri, saya apresiasi atas kesediaan Pak Menteri untuk rapat bersama dengan kami soal menjelaskan Permenperin 3 2021.

**KETUA RAPAT:**

Sudah tadi, Pak. Sudah.

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Nggak, ini saya tegaskan lagi. Karena, ini soal ini banyak mengundang pro-kontra, termasuk kita membahas juga kita melihat lebih jernih Pak Menteri. Karena, tadi saya sudah sebutkan ada kontradiktif ya antara undang-undang dengan Permenperin.

**KETUA RAPAT:**

Ya, cukup.



**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Jadi, saya minta ini diagendakan dimasukkan dalam kesimpulan, Pak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Sudah, sudah sudah tadi. Sudah dikatakan tadi kan dari awal. Ini Pak Menteri kebetulan ini tadi ada laporan dari sekretariat, Pak Menko sudah dalam perjalanan juga, OTW ke istana. Nanti, tolong Pak ini, saya mau percepat ini sedikit, ratasnya Pak.

**ANGGOTA KOMISI VI:**

Diagendakan aja, Pak. Nggak apa-apa.

**KETUA RAPAT:**

Bapak tanya Pak Jokowi, kok ratas terus begitu kita rapat. Jangan ke saya.

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Kita selalu dikalahkan ratas. Setiap kali ratas, ratas, ratas.

**KETUA RAPAT:**

Bapak harus protes itu ke petugas partai, ke petugas partai Bapak.

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Jadi, jadi dialog kita, dialektika kita tidak berkembang secara maksimal.

**KETUA RAPAT:**

Ya, saya mulai ya, draft. Nanti kalau soal protes tentang ratas, mungkin ke petugas partai itu.

Draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Perindustrian RI pembahasan RKP dan RKA KL tahun 2022. Rabu, 2 Juni 2021.

1. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan Menteri Perindustrian berdasarkan surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-361/MK.02/2021 dan B236/M.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021, tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif belanja Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.610.978.618.000, yang terdiri atas:

Pak, Pak Sekjen, saya membacakan Pak Sekjen kontrol ya kalau begitu ada kesalahan Bapak ini, intrupsi Pak ya.

Yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga dan uang makan sebesar Rp 797.591.613.000.
- b. Belanja operasional meliputi biaya operasional perkantoran serta biaya pemeliharaan peralatan kantor dan gedung sebesar Rp 360.576.586.000.
- c. Belanja nonoperasional meliputi kegiatan prioritas nasional dan kegiatan reguler sebesar Rp 1.452.810.419.000.

Selanjutnya Komisi VI DPRRI akan membahas masing-masing program lebih lanjut secara detail dalam RDP. Setuju ya, Pak.

**(RAPAT:SETUJU)**

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Sebentar, sebentar Pak.

Saya tidak setuju karena anggaran ini turun ya. Oleh karenanya, disebutkan dulu di bawah itu sebelum selanjutnya. Komisi VI DPRRI menyayangkan turunnya anggar, anggaran untuk Kementerian Perindustrian. Namun demikian, selanjutnya kami akan membahas. Nah, itu baru, jadi kami memang tidak setuju dengan anggaran ini diturunkan, dinaikkanlah gitu ya.

**KETUA RAPAT:**

Sambil ditulis aja, sambil ditulis.

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Komisi memprihatinkan ya.

**KETUA RAPAT:**

Menyayangkan.

**ANGGOTA:**

Menyayangkan itu bahasa.

**KETUA RAPAT:**

Menyayangkan itu bahasa.

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Sayang karena tidak sayang. Memprihatinkan turunnya anggaran kementerian.

**KETUA RAPAT:**

Prihatin prihatin itu.

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Ya prihatin turunnya anggaran kementerian.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Kok kayak Pak SBY prihatin begitu.

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Ya, saya kan anak buahnya Pak.

**KETUA RAPAT:**

Turunnya anggaran, selanjutnya. Komisi VI DPRRI akan membahas lebih lanjut secara detail.

**ANGGOTA:**

Itu usulannya Bu Evita itu.

**KETUA RAPAT:**

Oke ya, oke ketok ya.

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Tertulis dulu. Turunnya anggaran di Kementerian Perindustrian.

**KETUA RAPAT:**

Turunnya anggaran Kementerian Perindustrian.

**ANGGOTA:**

Sudah, Pak Pak Ketua. Jangan prihatin lah. Menolak, langsung saja. Biar Menteri Keuangan tahu.

**ANGGOTA:**

Udah setuju aja Komisi VI.

**KETUA RAPAT:**

Nggak setuju.

**ANGGOTA:**

Sudah jelas itu.

**KETUA RAPAT:**

Nggak setuju gitu.

**ANGGOTA:**

Menyetujui.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Ngash pesan yang jelas aja.

**KETUA RAPAT:**

Turunnya anggaran di Kementerian Perindustrian. Setuju ya.

**(RAPAT:SETUJU)**

Dua, Komisi VI DPRRI meminta meminta.

2. Komisi VI meminta komitmen Kementerian Perindustrian RI terkait anggaran pendidikan sebesar 969 miliar rupiah untuk lebih efektif, efisien, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan memperbanyak program sosialisasi dan pelatihan untuk industri dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional.

**(RAPAT:SETUJU)**

3. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.009.341.333.000 yang terbagi menjadi:
  - a. Usulan inisiatif program super prioritas sebesar Rp 1.391.786.000.000.
  - b. Usulan inisiatif program pendukung sebesar Rp 1.617.555.333.000.

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Pak Dammer, saya.

**KETUA RAPAT:**

33.000, itu 33.000 itu. Kurang ribu itu

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Saya usul, nomor 3 ini pindah ke nomor 2.

**KETUA RAPAT:**

Nomor 3 pindah ke nomor 2.

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Nomor 2, supaya nyambung dengan tidak setuju kita gitu.

**KETUA RAPAT:**

Jadi, 3 ke 2, 2 ke 3 gitu ya.

**F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Iya gitu.

**KETUA RAPAT:**

Iya, oke.

**(RAPAT:SETUJU)**

Oke, nomor 4 setelah itu.

Ini bukan *review* nomor 4, ini nggak dong, kan ini belum penjelasan ini. Belum tentu di-*review*. Belum dijelasin, kok udah di-*review*. Nomor 4 hapus dulu. Penjelasan.

**F-PDIP (DARMADI DURIANTO):**

Penjelasan. Penjelasan lebih detail. Kalau mengacu, harus keharusan itu.

**KETUA RAPAT:**

Nggak, Permenperin No 3 itu kan acuan, biar aja. Sudah sama ini. Kan mengacu ke sana. Ya, ini terkait kan gitu begitu. Oke.

**(RAPAT:SETUJU)**

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Tambah poin 5.

**KETUA RAPAT:**

Lima, Komisi VI.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Tambah poin 5, 1 kesimpulan Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Apa itu.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Komisi VI mendukung agar Lembaga Pendidikan Vokasi berbasis industri dan manufaktur yang saat ini dikelola oleh.

**KETUA RAPAT:**

Pelan-pelan, pelan pelan. Saya ngetik ini agak berat ini.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Komisi VI DPRRI mendukung agar lembaga pendidikan vokasi berbasis industri dan manufaktur yang saat ini dikelola.

**KETUA RAPAT:**

Berbasis industri, berbasis industri dan manufaktur.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Dan manufaktur yang saat ini dikelola oleh Kementerian Perindustrian untuk tetap dikelola Kementerian Perindustrian dan tidak dipindahkan.

**KETUA RAPAT:**

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Dan tidak dipindahkan ke

**KETUA RAPAT:**

Tetap perindustrian, tetap di Kementerian Perindustrian

**F-PG (NUSRON WAHID):**

Kementerian Perindustrian dan tidak dipindahkan pengelolaannya oleh kementerian lain.

**KETUA RAPAT:**

Tetap di kementerian, di tetap di kementerian. Tulis itu tulis dong. Tetap di Kementerian Perindustrian dan tidak dipindahkan. Oh, jelas itu ya. Oke ya, cukup ya. Oke, cukup Pak Nusron.

**(RAPAT:SETUJU)**

Pak Menteri setuju ya? Setuju.

Komisi VI DPRRI memberikan waktu kepada Pak Menteri Perindustrian untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPRRI.

**(RAPAT:SETUJU)**

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Sebelum ditutup, Bapak Pimpinan. Saya minta tolong ke Pak Menteri. Saya rasa suara saya ini suara semua anggota yang ada di sini.

Kita merasakan manfaat daripada program IKM-nya Ibu Gatri. Anggaran tahun ini begitu *drop* turunnya. Bagaimana dan apa yang akan dilakukan Pak Menteri kita nggak tahu, tetapi kita ingin anggaran itu tetap dinaikkan Pak Menteri. Karena, kita merasakan manfaat bagi dapil kita. Jadi, tolong itu dikembalikan dan dinaikkan anggarannya.

**KETUA RAPAT:**

Oke, dan juga dan juga dirjen-dirjen lain untuk menyampaikan nanti kalau program-program yang ada bisa dibawa ke daerah, gitu kan ya. Oke, cukup Pak Menteri. Saya tutup Pak Menteri ya.

Terima kasih kepada rekan-rekan Komisi VI yang dengan seksama dan penuh perhatian, walaupun dinamikanya juga bermacam-macam dan banyak yang menyayang dan sayang dan banyak juga yang prihatin kepada Menteri Perindustrian, dan begitu juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah menjelaskan dengan baik hal-hal yang mengenai kementerian kita. Tentu, ini juga menjadi apresiasi saya. Maka, pada hari ini saya tutup dengan,

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Om Shanti Shanti Om,  
Shalom,***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.36 WIB)**

**JAKARTA, 2 JUNI 2021**  
a.n KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si**  
**NIP.197104071992032001**